

Wali Kota Tangerang Terima Penghargaan Bhakti Satpol PP dari Kemendagri

MAKASAR (IM) - Wali Kota Tangerang, H. Arief R. Wisnansyah menerima penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Satpol PP Kota Tangerang atas peran aktifnya dalam menjaga lingkungan yang tertib dan ramah di lingkungan masyarakat.

“Terima kasih banyak untuk Satpol PP Kota Tangerang yang terus berdedikasi. Mudah-mudahan penghargaan ini bisa menjadi motivasi untuk memberikan yang terbaik untuk kota Tangerang,” kata Wali Kota Arief dalam keterangannya usai acara penganugerahan di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (3/3).

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) Dalam Negeri, John Wempi Wetipo dalam acara Apel Gelar Pa-

sukan HUT Ke-73 Satpol PP dan HUT Ke-61 Satlinmas.

Wali Kota Arief juga berharap polisi pamong praja ke depan bisa terus menjaga profesionalitasnya di tengah tantangan perkotaan yang makin kompleks.

Dalam mewujudkan Kota Tangerang yang nyaman dan aman untuk semua, perlu aparat satpol PP yang profesional. Tidak hanya tegas, tetapi juga ramah. Terlebih di tengah kompleksitas persoalan kota. Investasi harus ditingkatkan, namun harus juga diperhatikan aturan,” katanya.

Wakil Menteri (Wamen) Dalam Negeri, John Wempi Wetipo menegaskan bahwa satpol PP harus bisa berperan dalam menjawab tantangan zaman, terlebih di tengah resesi global.

“Satpol PP harus perkuat profesionalitas dan memperhatikan sikap humanis,” katanya. ● pp

PDAM Kota Tangerang Kerahkan 220 Pegawai Sosialisasi Aplikasi SiGanteng

TANGERANG (IM) - PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, Banten mengerahkan 220 pegawai melakukan sosialisasi secara langsung ke para pelanggan terkait telah adanya aplikasi Sistem Informasi Pelanggan Tirta Benteng (SiGanteng) yakni lapor meter secara mandiri.

Direktur Utama Perumda Tirta Benteng, Sumarya, di Tangerang, Jumat (3/3), mengatakan dalam aplikasi SiGanteng, masyarakat sudah bisa melakukan lapor meter secara mandiri. Selain itu, aplikasi ini masih akan terus disempurnakan, sehingga masyarakat bisa lebih mudah menikmati aplikasi SiGanteng.

“SiGanteng ini memiliki enam fitur yang masih disempurnakan, seperti info tagihan, info pemakaian air, pengaduan layanan, lapor meter mandiri dan pembayaran online,” kata Sumarya dalam keterangannya.

Sumarya menuturkan sosialisasi telah dilakukan sejak kemarin dengan target tiga ribu pelanggan per harinya. Dengan ini, Perumda Tirta Benteng berupaya dapat mengunjungi seluruh pelanggan yang kini sudah berjumlah 95.000 pelanggan dari berbagai wilayah di Kota Tangerang.

“Kami sosialisasi aplikasi SiGanteng secara door to door, ke pelanggan agar memudahkan mereka memahami tentang aplikasi SiGanteng. Di samping itu, mencoba melakukan pendekatan dan mendengar keluhan pelanggan secara langsung,” ujar Sumarya.

Dora, warga Kompleks Garuda Cipondoh RT 005/RW 006 mengaku aplikasi SiGanteng sangat memudahkan dan membantu dalam mengecek biaya tagihan serta lapor meter secara mandiri.

“Sosialisasi ini cukup membantu, apalagi ada aplikasi yang memudahkan saya dalam mengecek tagihan, tanpa harus bepergian. Saya merasa terbantu dengan adanya aplikasi SiGanteng, apalagi nantinya pembayaran bisa melalui aplikasi, jadi lebih efisien waktu,” ujarnya pula. ● pp



PAMERAN BERTAJUK ARSITEK ARSITEKTUR KOTA
Pengunjung melihat maket arsitektur sebuah gereja dalam pameran bertajuk “Arsitek Arsitektur Kota” di Gedung Malang Creative Centre (MCC), Jawa Timur, Jumat (3/3).

Pemkab Tangerang Siapkan Pembangunan Mal Pelayanan Publik

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, berencana membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Keberadaan MPP diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai pelayanan publik karena ada di satu tempat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja mengatakan, sebagaimana arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, semua kabupaten/kota sudah harus memiliki MPP pada 2024.

Karena itu, di Kabupaten Tangerang diupayakan dibangun MPP, yang juga disebut menjadi bagian dari komitmen pemkab dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Pemerintah Kabupaten Tangerang akan membangun MPP dari nol. Mulai dari gedung hingga menggandeng sejumlah in-

stansi untuk bergabung,” kata Soma, dalam siaran pers yang diterima, Jumat (3/3).

Untuk itu, beberapa hari terakhir digelar Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Pembangunan MPP Kabupaten Tangerang, Soma mengatakan, pihaknya tengah mendiskusikan tahapan-tahapan pembangunan MPP, termasuk soal regulasi, penganggaran, serta terkait pelaksanaan operasional MPP nanti.

Menurut Soma, MPP ini dirancang untuk memudahkan berbagai pelayanan publik. Tidak hanya dari instansi di lingkungan Pemkab Tangerang, tapi juga instansi pemerintah provinsi, pusat, instansi vertikal, juga BUMN, BUMD, maupun swasta.

Dengan berbagai layanan tersedia di MPP, Soma mengatakan, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus kebutuhannya. Diharapkan juga kehadiran MPP di Kabupaten Tangerang nantinya mendukung pelayanan publik yang cepat, aman, dan nyaman. ● pp



AKSI MEMBERSIHKAN SAMPAH DI BANTARAN SUNGAI CILIWUNG

Direktur Human Capital PT Citilink Indonesia Arief Adhi Sanjaya (kiri) bersama Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Citilink Indonesia Pandu Fajar Wisudha (kedua kiri), Satgas Naturalisasi Ciliwung Kota Bogor Suparno Jumar (kedua kanan), Leader World Clean Up Day Indonesia Andy Bahari (kanan), perwakilan BPBD Kota Bogor dan warga menunjukkan karung sampah dari hasil aksi membersihkan sampah di bantaran sungai Ciliwung, Kelurahan Kedunghalang, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/3). Selain aksi membersihkan sampah tersebut, program CSR PT Citilink Indonesia juga memberikan bantuan tong dan gerobak sampah untuk warga sebagai bentuk kepedulian dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

KELUHKAN BAU MENYENGAT

Warga Geruduk Pabrik Pengolahan Jagung di Cilegon

Warga di sekitar pabrik khususnya di Lingkungan Lijajar, Kecamatan Ciwandan mengeluhkan bau tersebut sejak sepekan terakhir. Warga merasa terganggu akibat bau tersebut. Bau menyengat itu membuat warga tak bisa tidur lantaran baunya semakin menyengat saat malam hari.

CILEGON (IM) - Warga sekitar pabrik pengolahan jagung di Ciwandan, Cilegon mengeluhkan bau menyengat yang menyebabkan pusing hingga mual.

Warga mendatangi pabrik tersebut untuk meminta penjelasan.

Warga di sekitar pabrik khususnya di Lingkungan Lijajar, Kecamatan Ciwandan mengeluhkan bau tersebut sejak sepekan terakhir. Warga merasa terganggu akibat bau tersebut.

Bau menyengat itu membuat warga tak bisa tidur lantaran baunya semakin menyengat saat malam hari.

“Kalau siang agak ringan baunya, tapi kalau tengah malam baunya beneran menyengat, anak-anak saya juga nggak bisa tidur karena baunya menyengat. Kepala pusing, muntah-muntah, tenggorokan sakit terus mual-mual baunya ini,” kata warga Lijajar, Susilawati, Jumat (3/3).

Susilawati mengatakan, masyarakat kadang mencium bau tersebut tapi kadang juga tidak.

Namun, saat malam hari, bau terasa lebih menyengat hingga mengganggu jam tidur warga sekitar.

“Sudah seminggu ini (baunya) kadang muncul kadang nggak. Tapi kalau malam itu kecum banget,” ujarnya.

Warga lain, Sanwani mengatakan, permasalahan bau kerap kali terjadi namun tak kunjung ada solusi.

Dia mengatakan, sebelum berganti nama menjadi PT Tereos FKS Indonesia, pabrik pengolahan jagung awalnya bernama PT Suba Indah kemudian berganti menjadi PT Redwood hingga sekarang menjadi PT Tereos FKS Indonesia namun permasalahan bau menyengat ini kerap terjadi.

“Ini dari zaman Suba Indah, Redwood sampe Tereos ini yang dikeluhkan pasti baunya. Makanya kita datang ke pabrik buat minta pertanggung jawaban,” kata Sanwani.

Sanwani mengatakan, berkaca dari masalah yang dulu.

Dia menuding pabrik pengolahan jagung tersebut kerap kali menumpuk limbah hasil olahannya hingga menyebabkan bau menyengat.

“Karena pabrik ingin untung gede akhirnya ditumpuk-tumpuk. Kalau mau ditangani secara maksimal mah tinggal panggil PPLI (Prasadha Pamunah Limbah Industri),” kata Sanwani.

Sementara itu, humas pabrik tersebut, Priyo Utomo, mengatakan, pihaknya akan menelusuri sumber bau yang dikeluhkan warga. Pihaknya akan menindaklanjuti keluhan warga tersebut.

“Tentunya akan kita tindak lanjuti, sebagai wakil manajemen tentunya akan berusaha semaksimal mungkin jika memang betul itu baunya dari kita. Keluhan masyarakat kita terima dengan lapang dada,” kata Priyo.

Pihaknya akan berdiskusi dan mengecek seluruh bagian pabrik untuk menindaklanjuti keluhan warga tersebut.

Marak Pencabulan Anak, Kajati Banten: Terapkan Hukum Kebiri

SERANG (IM) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Didik Farkhan bersikap tegas, dengan mempertimbangkan hukuman kebiri kepada para pelaku.

Hal ini menanggapi tingginya kasus pencabulan dan pelecehan seksual terhadap anak di sana.

“Kita petakan memang kalau tindak pidananya sudah sangat luar biasa mau enggak mau kita terapkan kebiri,” kata Didik, Jumat (3/3).

Dia melanjutkan, hukuman kebiri harus diterapkan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku predator seksual anak.

Dia bercerita pernah per-

nah menerapkan tuntutan kebiri semasa menjabat sebagai Kajati Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 2019.

“Hukum kebiri ya harus, saya di Jatim (Jawa Timur) pertama kali di Mojokerto (pernah menerapkan kebiri),” lanjutnya.

Dia lantas menginstruksikan kepada Kejari di Banten untuk memberikan hukuman berat kepada pelaku kekerasan seksual anak.

“Saya minta Aspidum yang ada di daerah itu dipantau untuk kita arahkan. Sebetulnya otoritas di Kejari, tapi kita akan diskusikan secara online untuk mengarah ke sana (kebiri),” tegasnya. ● pra

“Kita akan berdiskusi dengan bagian produksi, utility untuk me-review ulang bener nggak nih, ya kita akan cek seluruhnya. Sebenarnya kita sudah cek beberapa hari ya, karena sebenarnya perusahaan nakal itu nggak boleh,” kata Priyo. ● pra

PIMPIN KEKETUAAN ALIANSI DAERAH PEDULI SANITASI Bupati Tangerang: Program Kerja Utama Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

TANGERANG (IM) - Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar resmi memimpin Kepengurusan Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi) usai dirinya dikukuhkan sebagai ketua umum untuk periode 2022-2026.

“Akkopsi merupakan wadah bagi bupati maupun wali kota agar bisa sharing pengalaman dan program kerja terkait sanitasi dan air bersih,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Jumat (3/3).

Sekretaris Umum Akkopsi dijabat oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Bendahara Umum oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Kegiatan pelantikan dan pengukuhan pengurus Akkopsi tersebut dilakukan di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat.

Tercatat sebanyak 492 bupati maupun wali kota di seluruh Indonesia yang bergabung dalam aliansi tersebut.

Program kerja utama Akkopsi adalah mempercepat pembangunan infrastruktur berupa sarana sanitasi yang aman dan layak bagi masyarakat. Kemudian, Akkopsi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mengakses air bersih dan minum.

“Pembangunannya disesuaikan dengan kondisi demografi dan geografi serta dukungan pendanaan dari masing-masing anggota. Semua ini guna menyukseskan program 100-0-100 yang telah di-

canangkan oleh pemerintah,” kata Zaki,

Program 100-0-100 merupakan sebuah program menuju pemenuhan target tiga sektor, antara lain pemenuhan 100 persen akses air minum layak, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0 persen, dan pemenuhan 100 persen akses sanitasi layak.

Program itu bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun tujuan umum program 100-0-100 adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Zaki mengungkapkan semua anggota Akkopsi masih menuntaskan program terkait sanitasi yang bersih, sehat, dan layak serta akses air bersih. Pada 2024, program 100-0-100 diharapkan bisa tercapai 90 persen di daerah-daerah tersebut.

Khusus di Kabupaten Tangerang, sejumlah program terkait sanitasi dan akses air bersih dan minum telah dilaksanakan mulai dari program sanitasi untuk sekolah khususnya di tingkat SD dan SMP yang dilanjutkan ke SMA (Sanisek), kemudian sanitasi

berbasis pondok pesantren (Sanitren).

“Kami memang memfokuskan dan memprioritaskan pada institusi pendidikan karena institusi pendidikan akan melahirkan generasi-generasi muda perener dan agen perubahan yang bisa menjadi penggerak di lingkungan rumah dan lingkungan sekitar mereka,” terang Zaki.

“Mereka bisa mencontoh bagaimana sanitasi di sekolah sudah bersih, sehat dan layak untuk dipakai. Ini termasuk melindungi lingkungan agar tidak terpapar dengan perilaku-perilaku negatif yakni buang air besar sembarangan. Semua ini sudah kita lakukan,” imbuhnya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Yohanes Baptista Satya mengucapakan selamat atas terbentuknya pengurus baru Akkopsi periode 2022 sampai 2026.

“Pemerintah melalui Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Akkopsi untuk meningkatkan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Khususnya dalam mengakses air bersih dan minum serta sanitasi yang layak dan aman bagi masyarakat,” pungkask Satya. ● pp



PROGRAM PENANGANAN STUNTING PAK GINTING

Petugas kesehatan mengukur tinggi badan balita saat pelaksanaan program Penanganan Anak Kurang Gizi atau Stunting (Pak Ginting) di Puskesmas Satu Ulu Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (3/3). Program Pak Ginting merupakan inovasi pelayanan kesehatan khususnya pencegahan dan pemulihan balita yang mengalami kurang gizi atau stunting dengan memberikan menu makanan seimbang kepada balita serta dibimbing dan diawasi oleh petugas kesehatan di Puskesmas Satu Ulu Palembang dan dilaksanakan setiap hari Jumat.